



RANKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Alamat : Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Bojonegoro
Telepon : (0353) 881826, Email : badanpendapatandaerahkabupaten@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rankhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rankhir Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Bojonegoro 2024, yang memuat tentang tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi pelaksana. Rankhir Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari dokumen Rankhir Perubahan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rankhir Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yaitu “Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Berdaya Saing ”.

Demikian Rankhir Perubahan Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, 31 Juli 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bojonegoro

M. IBNU SOEYOETI, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review Terhadap Rankhir RKPD Tahun 2024.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan.....	49
2.7 Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Antar Perangkat Daerah	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
3.3 Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN	66

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	66
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Perkembangan Pendapatan Tahun 2022-2023	8
Tabel 2.2	Realisasi Kinerja Tahun 2023	9
Tabel TC	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat	13
29	Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro	
Tabel 2.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024	24
Tabel T-	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	29
C.30	Bojonegoro	
Tabel TC	Review Terhadap Rankhir Awal RKPD Tahun 2022 Badan	33
31	Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro	
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku	48
	Kepentingan Tahun 2022 Kab. Bojonegoro	
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	49
	Tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro	
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022	53
Tabel	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun	57
TC-33	2024dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kab. Bojonegoro	
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten	67
	Bojonegoro Tahun 2024	

f

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah keberadaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Badan Pendapatan Daerah merupakan satuan kerja bertipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 terhitung mulai tanggal 30 Desember 2021.

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rankhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rankhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rankhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rankhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- m. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD;
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- p. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- q. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah 2018-2023;
- r. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Perubahan Perbup 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- s. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rankhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dimaksudkan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah melalui upaya yang makin inovatif melalui inovasi yang berkelanjutan yang merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya dan berdasar rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah :

- 1. Sebagai Acuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2. Merumuskan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, berisikan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, baik kesuaian rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana indikatifnya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bapenda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2023 dan perkiraan realisasi target kinerja tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, evaluasi kinerja dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek capaian pendapatan dan aspek pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

1. Aspek Capaian Pendapatan

Perkembangan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan target dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar Rp. 119.094.869.958 atau sebesar 14,45% dari Rp. 824.411.705.824 (tahun 2022) menjadi Rp. 943.506.575.782 (tahun 2023). Hal itu juga terjadi pada pertumbuhan realisasi pendapatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.828.054.443 atau sebesar 8,56%. Naik turunnya penerimaan daerah disebabkan adanya dinamika terhadap subyek/obyek pendapatan. Sebagai bahan telaahan dan data pembandingan berikut disajikan pencapaian realisasi pendapatan per jenis pendapatan tahun 2022 dan 2023, sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1
DATA PERKEMBANGAN PENDAPATAN TAHUN 2022-2023

URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	TARGET (Rp)	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI	
	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	824.411.705.824	804.007.523.048	97,53%	943.506.575.782	872.835.577.491	92,51 %
PAJAK DAERAH	131.128.721.921	160.469.314.344	122,38%	137.141.658.017	168.809.185.672	123,09%
RETRIBUSI DAERAH	49.991.131.457	33.311.240.535	66,63%	69.323.659.475	38.316.501.319	55,27%
LABA PERUSAHAAN DRH	105.025.000.000	137.641.553.853	131,06%	182.540.313.221	182.683.243.730	100,08%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	538.266.852.446	472.585.414.316	87,80%	554.500.945.069	483.026.646.770	87,11%
PENDAPATAN TRANSFER	3.309.300.857.340	4.896.427.553.388	147,96%	4.434.637.814.632	5.062.242.640.011	114,15 %
PENDAPATAN TRANSFER PUSAT	3.198.268.612.693	4.700.349.821.884	146,97%	4.283.560.590.811	4.826.686.240.311	112,68%
DANA PERIMBANGAN	2.823.993.710.693	4.326.959.404.057	153,22%	3.864.902.869.811	4.408.605.363.036	114,07 %
DBH PAJAK/BUKAN PAJAK	1.531.971.963.500	3.090.429.744.876	201,73%	2.567.342.020.811	3.120.268.981.128	121,54%
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	870.125.915.000	861.028.899.802	98,95%	900.580.322.000	914.999.662.630	101,60%
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	421.895.832.193	375.500.759.379	89,00%	396.980.527.000	373.336.719.278	94,04%

DANA INSENTIF DAERAH (DID)	14.636.752.000	14.636.752.000	100,00%	0	0	
DANA DESA (DD)	359.638.150.000	358.753.665.827	99,75%	407.133.690.000	406.556.846.275	99,86%
DANA INSENTIF FISKAL	0	0		11.524.031.000	11.524.031.000	100,00%
PENDAPATAN TRANSFER PROV.	111.032.244.647	196.077.731.504	176,60%	151.077.223.821	235.556.399.700	155,92%
PENDAPATAN BAGI HASIL	99.233.267.647	182.848.759.504	184,26%	137.867.804.000	222.263.493.500	161,21%
BANTUAN KEUANGAN	11.798.977.000	13.228.972.000	112,12%	13.209.419.821	13.292.906.200	100,63%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DRH YANG SAH	74.706.582.600,00	66.852.157.919	89,49%	77.429.022.426	76.257.427.129	98,49%
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.	74.706.582.600,00	66.852.157.919	89,49%	77.429.022.426	76.257.427.129	98,49%
DANA BOS	-	-	-	-	-	-
JKN KAPITASI	74.706.582.600	66.852.157.919	89,49%	77.429.022.426	76.257.427.129	98,49%
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	4.208.419.145.764	5.767.287.234.355	137,04%	5.455.573.412.840	6.011.335.644.631	110,19%

2. Aspek Capaian Program Kegiatan

Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai Penjabaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro TA. 2023 sebesar Rp. 14.922.423.635 yang terbagi atas Belanja Pegawai Rp 8.844.686.667, Belanja Barang dan Jasa Rp 5.256.118.634, dan Belanja Modal Rp 821.618.334.

Sampai dengan 31 Desember 2023 relisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebesar 87,29% dengan realisasi Belanja sebesar Rp. 13.025.587.781.

Berikut realisasi kinerja tahun 2023, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Program/Kegiatan	Pelaksanaan				Ket.
	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Kegiatan (%)	
2	3	3	4	5	6
	14.922.423.635	13.025.587.781	87,29%	115,85%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	10.967.821.731	9.625.708.615	87,76%	100,00%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	295.286.000	241.815.484	81,89%	100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.466.000	146.185.534	80,12%	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.980.000	8.285.000	92,26%	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.740.000	6.787.000	87,69%	100,00%	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.500.000	4.422.400	68,04%	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.300.000	13.402.100	93,72%	100,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.300.000	62.733.450	83,31%	100,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.902.110.467	7.918.994.874	88,96%	100,00%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.624.006.667	7.690.957.568	89,18%	100,00%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	249.963.800	202.024.706	80,82%	100,00%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.400.000	9.958.700	87,36%	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.240.000	9.167.400	99,21%	100,00%	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000	1.953.400	97,67%	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	1.959.400	97,97%	100,00%	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.500.000	2.973.700	84,96%	100,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	239.500.000	199.465.000	83,28%	100,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	38.465.000	96,16%	100,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	199.500.000	161.000.000	80,70%	100,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.152.700	350.848.406	78,99%	100,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	41.453.200	92,12%	100,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	1.933.750	96,69%	100,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	14.582.500	97,22%	100,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.000.000	45.418.000	98,73%	100,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.222.700	46.180.000	99,91%	100,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00%	100,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.130.000	199.480.956	69,23%	100,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.111.964	279.167.131	88,03%	100,00%	
Pengadaan Mebel	30.000.000	30.000.000	100,00%	100,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	287.111.964	249.167.131	86,78%	100,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.497.656	312.067.866	84,23%	100,00%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.381.900	87,64%	100,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.583.776	147.258.913	78,50%	100,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.913.880	160.427.053	90,17%	100,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.162.944	323.349.854	81,01%	100,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.747.944	167.633.700	87,88%	100,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.415.000	44.072.300	85,72%	100,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157.000.000	111.643.854	71,11%	100,00%	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.954.601.904	3.399.879.166	85,97%	131,70%	

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.954.601.904	3.399.879.166	85,97%	100,00%	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	30.000.000	13.671.622	45,57%	100,00%	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	277.250.000	229.482.401	82,77%	100,00%	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	113.700.000	106.032.648	93,26%	100,00%	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20.000.000	19.998.548	99,99%	100,00%	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	391.259.630	332.055.876	84,87%	100,00%	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	195.000.000	133.389.531	68,40%	100,00%	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	457.236.120	419.171.070	91,67%	117,79%	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	523.039.206	411.641.296	78,70%	83,66%	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	513.256.500	449.332.764	87,55%	83,66%	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	330.754.448	297.522.474	89,95%	94,79%	
Penagihan Pajak Daerah	128.000.000	89.552.300	69,96%	271,10%	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	240.450.000	230.454.000	95,84%	100,00%	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	348.050.000	325.106.890	93,41%	100,00%	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	215.000.000	180.583.492	83,99%	100,00%	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah	171.606.000	161.884.254	94,33%	100,00	

C. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023

Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai Penjabaran P-APBD Kabupaten Bojonegoro TA. 2023 sebesar Rp. 14.922.423.635,00 yang terbagi atas Belanja Pegawai Rp 8.844.686.667,00 Belanja Barang dan Jasa Rp 5.256.118.634,00 dan Belanja Modal Rp 821.618.334,00. Hasil Evaluasi capaian Program Tahun 2023 dilihat dari realisasi keuangan telah tercapai sebesar 87,29%. Sedangkan rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan telah tercapai sebesar 115,85%. Realisasi pelaksanaan kegiatan melampaui target dikarenakan kondisi nyata di lapangan menuntut Bapenda untuk terus melaksanakan kegiatan pelayanan. Kegiatan tersebut menyesuaikan kebutuhan masyarakat Bojonegoro untuk mewujudkan pelayanan prima serta sebagai usaha Bapenda untuk mencapai target pendapatan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun 2024 dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan 25 Januari 2024 sebesar 1,24% dan harapan keberhasilan kinerja 100 % pada akhir tahun 2024. Capaian kinerja

persentase PAD terhadap total pendapatan pada tahun 2023 dengan target yang ditetapkan sebesar 97% terealisasi 83,96%. Berikut realisasi kinerja Renstra 2018-2023, sebagaimana table T-C 29 berikut ::

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan n (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-2 (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)						Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
												Target Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)			
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
						KEUANGAN																			
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan	19,15 %	13.592.47 4.174	19,21 %	8.460.44 0.492		3.954.601.904	24,32 %	3.399.879.166	2,8411 21495	85,97%	100,00 %	5.605.035.038	100,00 %	5.605.035.038	300,00 %	11.905.938.011		
							Persentase Capaian penerimaan pajak daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	61,73 %		70,27 %				24,37 %	-	291,86 %		100,00 %	1.713.500.016	100,00 %		300,00 %			
							Persentase Capaian penerimaan pajak daerah PBB dan BPHTB yang dikelola	31,45 %		53,42 %				16,44 %	-	627,48 %		100,00 %	1.312.747.068	100,00 %		300,00 %			
							Jumlah Penerimaan PAD Non Pajak	33,60 %		89,55 %				0,00%	-	0,00%		100,00 %	410.000.000	100,00 %		300,00 %			
				02:01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	100%		100,00 %		100%	3.954.601.904	100,00 %	3.399.879.166	100,00 %	85,97%	100%	5.605.035.038	100%	5.605.035.038	300 %	11.905.938.011		
5		4	02:01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Estimasi pendapatan daerah yang disusun	7	108.274.000	4 Dokumen	72.323.786	2 Dokumen	30.000.000	13.671.622	100,00 %	45,57%	2 DOKUMEN	29.344.450	2 DOKUMEN	29.344.450	6 Dokumen	88.033.350				
5		4	02:01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun	6 Dokumen	421.602.450	4 Dokumen	137.544.530	2 Dokumen	277.250.000	229.482.401	100,00 %	82,77%	2 DOKUMEN	407.558.760	2 DOKUMEN	407.558.760	6 Dokumen	828.772.350				
5		4	02:01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan/ Sosialisasi Pajak Daerah yang	15 Laporan	695.604.430	12 Laporan	530.403.307	5 Laporan	113.700.000	106.032.648	100,00 %	93,26%	5 LAPO RAN	125.375.250	5 LAPO RAN	125.375.250	15 Lapora	395.245.476				

						dilaksanakan															n	
6		4	02:01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	20.000.000		5 Unit	20.000.000	5 Dokumen	19.998.548	100,00 %	99,99%	3 UNIT	1.362.791.198	3 UNIT	1.362.791.198	15 Unit	60.000.000	
5		4	02:01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan monitoring dan Evaluasi	12 Dokumen	1.017.345.320	9 Dokumen	650.891.218	4 Dokumen	348.050.000	4 Dokumen	325.106.890	100,00 %	93,41%	4 DOKUMEN	341.750.000	4 DOKUMEN	341.750.000	12 Dokumen	1.153.962.310
5		4	02:01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terdata dan terdaftar	3 Laporan	2.052.634.200	2 Laporan	1.499.307.881	1 Laporan	391.259.630	1 Laporan	332.055.876	100,00 %	84,87%	12 LAPORAN	710.793.141	12 LAPORAN	710.793.141	36 Laporan	1.464.765.410
5		4	02:01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan	5133 Dokumen	2.239.737.096	3630 Dokumen	1.408.983.996	3502 Dokumen	523.039.206	3502 Dokumen	411.641.296	100,00 %	78,70%	2409 DOKUMEN	503.383.766	2409 DOKUMEN	503.383.766	7595 Dokumen	1.616.614.003
5		4	02:01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang terealisasi	3215 Dokumen	531.992.200	2751 Dokumen	395.161.871	1515 Dokumen	128.000.000	1436 Dokumen	89.552.300	94,79 %	69,96%	1807 DOKUMEN	105.746.200	1807 DOKUMEN	105.746.200	5696 Dokumen	317.238.600
5		4	02:01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Wajib pajak yang dilakukan penilaian dan dimutakhirkan	219000 Obyek Pajak	1.592.086.670	147259 Obyek Pajak	888.099.326	730000 Obyek Pajak	457.236.120	730000 Obyek Pajak	419.171.070	100,00 %	91,67%	737.612 OBJEK PAJAK	689.012.120	737.612 OBJEK PAJAK	689.012.120	2212836 objek	1.861.372.360
5		4	02:01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan pendampingan kepada wajib pajak (PBB)	21 Layanan	1.298.628.100	14000 Layanan	876.194.600	7000 Layanan	513.256.500	5856 Layanan	449.332.764	83,66 %	87,55%	9000 LAYANAN	276.331.125	9000 LAYANAN	276.331.125	27000 Dokumen	871.133.872
5		4	02:01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas PBB-P2 yang dipelihara dan dimutakhirkan	21 Dokumen	897.310.008	13523 Dokumen	692.186.046	7000 Dokumen	330.754.448	5856 Dokumen	297.522.474	83,66 %	89,95%	9000 DOKUMEN	164.949.170	9000 DOKUMEN	164.949.170	27000 Dokumen	520.002.260
5		4	02:01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan perubahan SPT PBB yang diselesaikan	24 Dokumen	1.019.976.850	16000 Dokumen	635.365.150	21688 Dokumen	240.450.000	21688 Dokumen	230.454.000	100,00 %	95,84%	150 DOKUMEN	291.992.000	150 DOKUMEN	291.992.000	450 Dokumen	875.976.000
5		4	02:01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Intensifikasi, teknis perhitungan, penetapan dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah yang disusun	36 Laporan	560.916.000	24 Laporan	301.577.528	12 Laporan	195.000.000	12 Laporan	133.389.531	100,00 %	68,40%	12 LAPORAN	198.402.488	12 LAPORAN	198.402.488	36 Laporan	626.104.342
5		4	02:01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemantauan pendapatan retribusi daerah dan PAD yang dilaksanakan	36 Laporan	636.366.850	24 Laporan	372.401.253	12 Laporan	215.000.000	12 Laporan	180.583.492	100,00 %	83,99%	12 LAPORAN	221.105.370	12 LAPORAN	221.105.370	36 Laporan	697.217.679

5		4	02:01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	500.000.000			2 Laporan	171.606.000	2 Laporan	161.884.254	100,00 %	94,33%	2 LAPORAN	176.500.000	2 LAPORAN	176.500.000	6 Laporan	529.500.000
		1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	32.940.287.812	100%	16.425.402.691	100%	10.967.821.731	100%	9.625.708.615	100,00 %	87,76 %	100%	11.016.599.708	100%	11.016.599.708	300 %	31.704.356.946
		1	02:01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	54 Dokumen	489.077.450	36 Dokumen	169.560.910	12 Dokumen	295.286.000	12 Dokumen	241.815.484	100,00 %	81,89%	12 DOKUMEN	165.949.765	12 DOKUMEN	165.949.765	36 Dokumen	965.797.681
5		1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	16 Dokumen	312.650.700	11 Dokumen	112.769.110	2 Dokumen	182.466.000	2 Dokumen	146.185.534	100,00 %	80,12%	2 DOKUMEN	49.364.765	2 DOKUMEN	49.364.765	6 Dokumen	603.985.268
5		1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	6 Dokumen	23.573.750	4 Dokumen	13.339.000	2 Dokumen	8.980.000	2 Dokumen	8.285.000	100,00 %	92,26%	2 DOKUMEN	8.980.000	2 DOKUMEN	8.980.000	6 Dokumen	26.940.000
5		1	02:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6 Dokumen	20.485.250	4 Dokumen	10.169.250	2 Dokumen	7.740.000	2 Dokumen	6.787.000	100,00 %	87,69%	2 DOKUMEN	7.740.000	2 DOKUMEN	7.740.000	6 Dokumen	23.220.000
5		1	02:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	6 Dokumen	16.060.200	4 Dokumen	7.308.350	2 Dokumen	6.500.000	2 Dokumen	4.422.400	100,00 %	68,04%	2 DOKUMEN	6.500.000	2 DOKUMEN	6.500.000	6 Dokumen	19.500.000
5		1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan & realisasi kinerja yang disusun	12 Laporan	35.224.200	8 Laporan	20.428.000	2 Laporan	14.300.000	2 Laporan	13.402.100	100,00 %	93,72%	2 LAPORAN	14.300.000	2 LAPORAN	14.300.000	6 Laporan	42.900.000
5		1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan	81.083.350	4 Laporan	5.547.200	2 Laporan	75.300.000	2 Laporan	62.733.450	100,00 %	83,31%	2 LAPORAN	79.065.000	2 LAPORAN	79.065.000	6 Laporan	249.252.413
		1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	21 Laporan	28.658.817.475	14 Laporan	13.979.433.046	7 Laporan	8.902.110.467	7 Laporan	7.918.994.874	100,00 %	88,96%	7 LAPORAN	9.497.490.850	7 LAPORAN	9.497.490.850	21 Laporan	26.832.315.614
		1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Adm Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	27.279.181.625	44 Orang/bulan	13.184.273.634	44 Orang/bulan	8.624.006.667	44 Orang/bulan	7.690.957.568	100,00 %	89,18%	44 ORANG/BU LAN	9.034.037.050	44 ORANG/BU LAN	9.034.037.050	132 Orang/bulan	25.441.954.214
		1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 Dokumen	1.299.311.400	24 Dokumen	750.008.262	12 Dokumen	249.963.800	12 Dokumen	202.024.706	100,00 %	80,82%	12 DOKUMEN	435.313.800	12 DOKUMEN	435.313.800	36 Dokumen	1.305.941.400
		1	02:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Keuangan yang terverifikasi	36 Dokumen	32.168.850	48 Dokumen	18.943.750	24 Dokumen	11.400.000	24 Dokumen	9.958.700	100,00 %	87,36%	24 DOKUMEN	11.400.000	24 DOKUMEN	11.400.000	72 Dokumen	34.200.000

		1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3 Laporan	20.748.400	2 Laporan	7.724.550	1 Laporan	9.240.000	1 Laporan	9.167.400	100,00%	99,21%	1 LAPORAN	9.240.000	1 LAPORAN	9.240.000	3 Laporan	27.720.000
		1	02:02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tindak lanjut	3 Dokumen	7.000.150	2 Dokumen	4.279.700	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.953.400	100,00%	97,67%	1 DOKUMEN	2.000.000	1 DOKUMEN	2.000.000	3 Dokumen	6.000.000
		1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semester an	72 Laporan	7.192.650	48 Laporan	5.038.200	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	1.959.400	100,00%	97,97%	12 LAPORAN	2.000.000	12 LAPORAN	2.000.000	36 Laporan	6.000.000
		1	02:02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan prognosis realisasi anggaran	3 Dokumen	13.214.400	2 Dokumen	9.164.950	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	2.973.700	100,00%	84,96%	1 DOKUMEN	3.500.000	1 DOKUMEN	3.500.000	3 Dokumen	10.500.000
		1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	6 Laporan	539.514.000	4 Laporan	404.576.500	2 Laporan	239.500.000	2 Laporan	199.465.000	100,00%	83,28%	2 LAPORAN	145.900.000	2 LAPORAN	145.900.000	6 Laporan	391.500.000
		1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	9 Paket	127.014.000	6 Paket	86.104.500	3 Paket	40.000.000	3 Paket	38.465.000	100,00%	96,16%	3 PAKET	55.400.000	3 PAKET	55.400.000	9 Paket	120.000.000
		1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mendapat bimbingan teknis	67 Orang	412.500.000	42 Orang	318.472.000	25 Orang	199.500.000	25 Orang	161.000.000	100,00%	80,70%	25 ORANG	90.500.000	25 ORANG	90.500.000	75 Orang	271.500.000
		1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	21 Laporan	1.241.002.450	14 Laporan	797.005.545	7 Laporan	444.152.700	7 Laporan	350.848.406	100,00%	78,99%	7 LAPORAN	571.549.885	7 LAPORAN	571.549.885	21 Laporan	1.277.428.844
5		1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	6 Paket	55.302.950	4 Paket	9.864.000	2 Paket	45.000.000	2 Paket	41.453.200	100,00%	92,12%	1 PAKET	15.000.000	1 PAKET	15.000.000	3 Paket	45.000.000
5		1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	27.857.500	4 Paket	25.211.300	3 Paket	2.000.000	3 Paket	1.933.750	100,00%	96,69%	2 PAKET	2.000.000	2 PAKET	2.000.000	6 Paket	6.000.000
5		1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	112.053.950	4 Paket	96.875.900	2 Paket	15.000.000	2 Paket	14.582.500	100,00%	97,22%	2 PAKET	10.000.000	2 PAKET	10.000.000	6 Paket	30.000.000
5		1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan ManMin yang disediakan	6 Paket	46.000.000	4 Paket	82.810.500	5 Paket	46.000.000	5 Paket	45.418.000	100,00%	98,73%	5 PAKET	38.000.000	5 PAKET	38.000.000	15 Paket	114.000.000
5		1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	141.532.000	6 Paket	93.873.050	1 Paket	46.222.700	1 Paket	46.180.000	100,00%	99,91%	1 PAKET	46.222.700	1 PAKET	46.222.700	3 Paket	138.668.100
5		1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Dokumen	5.280.000	24 Dokumen	3.480.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	1.800.000	100,00%	100,00%	12 DOKUMEN	1.800.000	12 DOKUMEN	1.800.000	36 Dokumen	5.400.000

5		1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang difasilitasi	36 Laporan	852.976.050	24 Laporan	484.890.795	12 Laporan	288.130.000	12 Laporan	199.480.956	100,00 %	69,23%	12 LAPORAN	458.527.185	12 LAPORAN	458.527.185	36 Laporan	938.360.744
		1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6 Jenis	532.655.937	4 Jenis	257.602.121	2 Jenis	317.111.964	2 Jenis	279.167.131	100,00 %	88,03%	1 JENIS	92.002.856	1 JENIS	92.002.856	3 Jenis	415.735.956
				5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	109.800.000	1 Unit	78.300.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	100,00 %	100,00%						
				11	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	3 Unit	422.855.937	2 Unit	179.302.121	4 Unit	287.111.964	4 Unit	249.167.131	100,00 %	86,78%	3 UNIT	92.002.856	3 UNIT	92.002.856	9 Unit	415.735.956
		1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	9 Jenis	928.245.556	6 Jenis	491.492.585	3 Jenis	370.497.656	3 Jenis	312.067.866	100,00 %	84,23%	3 JENIS	323.846.261	3 JENIS	323.846.261	9 Jenis	1.015.836.327
5		1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dilayani per tahun	36 Laporan	14.600.300	24 Laporan	6.610.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	4.381.900	100,00 %	87,64%	12 LAPORAN	5.000.000	12 LAPORAN	5.000.000	36 Laporan	15.000.000
5		1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa yang terbayar	108 Laporan	529.349.152	72 Laporan	285.897.177	36 Laporan	187.583.776	36 Laporan	147.258.913	100,00 %	78,50%	36 LAPORAN	161.962.965	36 LAPORAN	161.962.965	108 Laporan	515.925.747
5		1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Non PNS yang diberikan Administrasi	39 Laporan	384.296.104	26 Laporan	198.985.408	13 Laporan	177.913.880	13 Laporan	160.427.053	100,00 %	90,17%	14 LAPORAN	156.883.296	14 LAPORAN	156.883.296	42 Laporan	484.910.581
		1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	9 Jenis	550.974.944	6 Jenis	325.731.984	3 Jenis	399.162.944	3 Jenis	323.349.854	100,00 %	81,01 %	3 JENIS	219.860.091	3 JENIS	219.860.091	9 Jenis	805.742.524
5		1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan Operasional yang dipelihara	27 Unit	452.237.944	18 Unit	281.344.100	9 Unit	190.747.944	9 Unit	167.633.700	100,00 %	87,88%	9 UNIT	167.210.341	9 UNIT	167.210.341	27 UNIT	642.611.688
5		1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja dan mesin yang dipelihara	15 Unit	38.845.000	10 Unit	24.536.000	5 Unit	51.415.000	5 Unit	44.072.300	100,00 %	85,72%	5 UNIT	11.649.750	5 UNIT	11.649.750	15 Unit	36.725.837
5		1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	59.892.000	2 Unit	19.851.884	1 Unit	157.000.000	1 Unit	111.643.854	100,00 %	71,11%	1 UNIT	41.000.000	1 UNIT	41.000.000	3 Unit	126.405.000
					JUMLAH TOTAL			46.532.761.986		24.885.843.183		14.922.423.635		13.025.587.781	113,20 %	86,68%		16.621.634.746		16.621.634.746		43.610.294.957

Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan Sub Bagian Keuangan dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;
2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan tetap waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal.

2. Faktor Penghambat

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam mencapai target kinerja, diantaranya sebagai berikut :

1. Masih perlunya penguatan mapping potensi terhadap 10 jenis pajak daerah serta pengukuran target penerimaan pajak daerahnya yang dituangkan didalam kertas kerja perencanaan peningkatan target pajak daerah per jenis pajak;
2. Akselerasi ketentuan baru dari UU no. 1 Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti dengan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah termasuk penguatan strategi untuk optimalisasi PBJT ;

3. Masih rendahnya kesadaran OPD penyelenggara layanan retribusi untuk dapat mengoptimalkan penerimaannya. Hal ini tentunya kurang sejalan dengan semangat pelayanan retribusi khususnya retribusi jasa usaha yang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, termasuk salah satunya adalah peningkatan kemudahan pembayaran retribusi berbasis cash less yang dapat dibayarkan kapanpun dimanapun;
4. Penambahan SDM yang sesuai dengan Analisa Jabatan dan analisis beban kerja (ABK) diharapkan sudah mendekati kebutuhan target sasaran kinerja organisasi karena akan diketahui mengenai uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan yang diperlukan untuk mencapai target sasaran keinerja yaitu optimalisasi pendapatan daerah. Salah satunya adalah pemeriksaan pajak daerah, sehingga atas pelaporan yang tidak sesuai didalam SPTPD, dapat ditetapkan kembali atas kekurangannya dengan penerbitan SKPDKB atas hasil pemeriksaan;
5. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat terkait dengan alokasi dan penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll) mulai dari perhitungan penetapan yang kadang-kadang sangat cepat berubah;
6. Rendahnya kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan ketidakpatuhan pelaporan pajak daerah terutang sehingga tidak sesuai dengan potensi yang sudah diukur oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

7. Kurangnya punishment atau penerapan sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak didalam melaporkan omzet yang sebenarnya;
8. Perlu treatment khusus untuk mengurai permasalahan perlambatan penerimaan PBB-P2 sektor perkotaan atau memunculkan strategy manajemen konflik kompetitif antar pemerintah desa untuk lunas PBB-P2 diawal waktu dengan reward ke pemerintah desa.

3. Rekomendasi Tindaklanjut

Rekomendasi dan tindaklanjut atas capaian kinerja yang kurang dan tidak optimal maka ditindaklanjuti, yaitu melakukan kajian dan evaluasi secara mendalam, analisis masalah dan optimalisasi sumberdaya yang ada sehingga dapat mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bojonegoro, pada dasarnya kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai tulang punggung pembangunan daerah yang terus bekerja keras dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan guna memperkuat keuangan daerah.

Dalam upaya pencapaian program tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Untuk aspek pendapatan asli daerah : kurangnya kesadaran wajib pajak, kurang optimalnya pengetahuan wajib pajak terhadap pemanfaatan IT dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah penghasil.
- b. Untuk aspek dana perimbangan : adanya penerimaan yang kurang stabil khususnya DBH Migas karena pengaruh kondisi perekonomian dunia terkait dengan ICP dan kurs US\$, sehingga menyulitkan prediksi penerimaan DBH Migas.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk aspek pendapatan asli daerah : mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dan penanganan yang lebih persuasive, memaksimalkan campaign inovasi perpajakan berbasis IT, kurangnya koordinasi dengan OPD penghasil tentunya dapat diatasi dengan evaluasi yang lebih rutin serta media komunikasi yang lebih intensif.

Demikian juga untuk menjawab tantangan transformasi digital perpajakan daerah dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dan penatausahaan pada sisi Bapenda maka penguatan digitalisasi pajak daerah terus kami tingkatkan. Beberapa transformasi digital tersebut adalah adanya dashboard pelayanan pajak berbasis web antara lain:

- SIMPATDU
- H2H dengan BPN
- E-SPPT aplikasi penghubung pelayanan PBB-P2 sebagai bentuk layanan tatap maya (semua dalam gengaman dan paperless).
- Dijamin Minul (Web Servis Pelaporan Pajak Resto/Mamin dan MBLB yang bersumber dari APBD, APBDes, Dana Bos, dan BOP Lembaga Pendidikan)
- E-BPHTB (Akun seluruh PPAT/S dan akun admin Bapenda)
- Bajol Patri (Bayar Pajak Online Tanpa Antri)
- Web Servis Cek PBB-P2 untuk publish/umum

- Web Servis Cek PBB-P2 untuk petugas pemungut tingkat kecamatan, desa/kelurahan sebagai quality control pemenuhan target dan realisasi sesuai wilayah masing-masing
- SISMIOP dan Smart Map PBB-P2 berbasis dekstop
- SIMPEL (Sistem Tracking Pelayanan PBB-P2) berbasis dekstop

Termasuk perluasan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dengan diperluasnya kanal pembayaran berbasis tempat pembayaran (Bank Jatim, BNI, BRI, Indomart, Alfamart, PT POS Indonesia) dan berbasis E-Commerce (Gopay, Tokopedia, OVO, Dana, ShopeePay) yang bertujuan untuk menjangkau seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan kedepan akan dikembangkan untuk seluruh pelayanan pajak daerah.

Bahwa optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah dalam menopang PAD sesungguhnya masih dapat ditingkatkan. Namun karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang memberi dampak penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat telah dikembangkan kebijakan pemberian insentif investasi berupa keringanan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah, sehingga potensi penerimaan sebagai sumber PAD baru akan diperoleh dalam jangka panjang. Termasuk penyesuaian besaran retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana effort atas besarnya beban operasional layanan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu yang di dalam pemungutan retribusinya tidak hanya menutup sebagian biaya operasional layanan dimaksud, namun dalam layanan jasa usaha mampu bersaing dengan penyedia dari luar pemerintah daerah.

2. Untuk aspek dana perimbangan : pendapatan dana perimbangan dari Pusat diperlukan peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, memantau perkembangan lifting, ICP serta klarifikasi pada saat rapat rekonsiliasi lifting dan bagi hasil. Selain itu proyeksi

pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak harus siap dikoreksi setiap saat dan memperhatikan kurs. Hal ini berarti juga ada koreksi dari sisi belanja, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya default (gagal bayar) dan terciptanya koordinasi dan komunikasi yang lebih optimal sehingga penyaluran TKD (transfer ke daerah) lebih presisi baik dari segi waktu dan jumlah karena hal ini akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan yang baik.

Adapun pencapaian program tahun 2024, dapat kami sampaikan untuk aspek pendapatan sebagaimana dalam tabel 2.3 dan 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERKIRAAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

URAIAN	TARGET INDUK APBD	REALISASI		%
		(1 JAN S/D 30 JUNI 2024)		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 950.087.500.608,00	Rp 499.997.044.804,31	52,63	
PAJAK DAERAH	Rp 148.254.719.057,00	Rp 81.747.070.610,00	55,14	
RETRIBUSI DAERAH	Rp 56.528.766.303,00	Rp 20.521.533.929,00	36,30	
LABA PERUSAHAAN DAERAH	Rp 145.348.820.179,00	Rp 156.753.329.420,48	107,85	
LAIN-LAIN PAD YG SAH	Rp 599.955.195.069,00	Rp 240.975.110.844,83	40,17	
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 4.410.077.818.013,00	Rp 2.335.523.630.694,00	24,72	
PENDAPATAN TRANSFER PUSAT	Rp 4.309.852.217.689,00	Rp 2.276.671.293.594,00	25,29	
DANA PERIMBANGAN	Rp 3.896.125.720.689,00	Rp 2.019.571.538.394,00	23,80	
DBH PAJAK	Rp 724.228.571.689,00	Rp 331.181.250.850,00	18,36	
DBH BUKAN PAJAK	Rp 1.806.192.054.000,00	Rp 1.004.682.866.067,00	25,30	
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Rp 977.889.045.000,00	Rp 493.483.900.000,00	27,36	
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Rp 387.816.050.000,00	Rp 190.223.521.477,00	18,00	
DAK FISIK	Rp 14.146.788.000,00	Rp 1.306.824.000,00	0,00	
DAK NONFISIK	Rp 373.669.262.000,00	Rp 188.916.697.477,00	18,69	
DANA DESA	Rp 398.873.433.000,00	Rp 249.673.223.200,00	40,79	
INSENTIF FISKAL	Rp 14.853.064.000,00	Rp 7.426.532.000,00	-	
PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI	Rp 100.225.600.324,00	Rp 58.852.337.100,00	58,72	
PENDAPATAN BAGI HASIL	Rp 100.225.600.324,00	Rp 58.652.860.100,00	58,52	
BANTUAN KEUANGAN	Rp -	Rp 199.477.000,00		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DRH YANG SAH	Rp 75.453.648.426,00	Rp 39.615.323.050,00	52,50	
DANA BOS	Rp -	Rp -		
JKN KAPITASI	Rp 75.453.648.426,00	Rp 39.615.323.050,00	52,50	
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	Rp 5.435.618.967.047,00	Rp 2.875.135.998.548,31	52,89	

Tabel 2.4
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

URAIAN	TARGET INDUK APBD	TARGET P-APBD 2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 950.087.500.608,00	Rp 904.001.559.764,00
PAJAK DAERAH	Rp 148.254.719.057,00	Rp 157.634.030.745,00
RETRIBUSI DAERAH	Rp 56.528.766.303,00	Rp 51.385.645.985,00
LABA PERUSAHAAN DAERAH	Rp 145.348.820.179,00	Rp 156.872.525.283,00
LAIN-LAIN PAD YG SAH	Rp 599.955.195.069,00	Rp 538.109.357.751,00
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 4.410.077.818.013,00	Rp 4.410.077.818.013,00
PENDAPATAN TRANSFER PUSAT	Rp 4.309.852.217.689,00	Rp 4.309.852.217.689,00
DANA PERIMBANGAN	Rp 3.896.125.720.689,00	Rp 3.896.125.720.689,00
DBH PAJAK	Rp 724.228.571.689,00	Rp 724.228.571.689,00
DBH BUKAN PAJAK	Rp 1.806.192.054.000,00	Rp 1.806.192.054.000,00
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Rp 977.889.045.000,00	Rp 977.889.045.000,00
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Rp 387.816.050.000,00	Rp 387.816.050.000,00
DAK FISIK	Rp 14.146.788.000,00	Rp 14.146.788.000,00
DAK NONFISIK	Rp 373.669.262.000,00	Rp 373.669.262.000,00
DANA DESA	Rp 398.873.433.000,00	Rp 398.873.433.000,00
INSENTIF FISKAL	Rp 14.853.064.000,00	Rp 14.853.064.000,00
PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI	Rp 100.225.600.324,00	Rp 100.225.600.324,00
PENDAPATAN BAGI HASIL	Rp 100.225.600.324,00	Rp 100.225.600.324,00
BANTUAN KEUANGAN	Rp -	Rp -
LAIN-LAIN PENDAPATAN DRH YANG SAH	Rp 75.453.648.426,00	Rp 75.453.648.426,00
DANA BOS	Rp -	Rp -
JKN KAPITASI	Rp 75.453.648.426,00	Rp 75.453.648.426,00
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	Rp 5.435.618.967.047,00	Rp 5.389.533.026.203,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bojonegoro.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Analis Anggaran Ahli Muda;
 3. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan & Pengembangan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pajak Daerah I, membawahi :
 1. Sub Koordinator Penilai Pajak Ahli Muda;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - e. Bidang Pajak Daerah II, membawahi :
 1. Sub Koordinator Penilai Pajak Ahli Muda;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - e. Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan & Dana Transfer;
 2. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak;
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
- c. Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan di bidang pendapatan daerah di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas peningkatan pendapatan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan organisasi, dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara jelas pula;
3. Telah adanya landasan hukum yang jelas dan baku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur secara jelas regulasi mengenai pemungutan pajak daerah, retribusi daerah;
4. SDM yang memadai, sarana, prasarana peralatan dan teknologi yang tersedia memadai dan proporsional;
5. Adanya inovasi perpajakan berbasis digital seperti E-SPPT, Dijamin Minul (Pajak Mamin dan MBLB) dan Bajol Patri (Bayar Pajak Online Tanpa Antri);
6. Telah adanya teknologi Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu (SIMPADU) mengintegrasikan seluruh sistem pelayanan pajak daerah;
7. Adanya teknologi informasi yang saat ini telah dilakukan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) dalam mendukung manajemen pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

8. Dukungan alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan operasional maupun yang bersifat incidental;
9. Terjalannya kemitraan yang sinergis antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD), maupun lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance;
10. Adanya integrasi sistem perpajakan daerah dengan OPD lain salah satunya DPMPTSP yang mewajibkan pelunasan PBB-P2 didalam pelayanan IMB. Selain itu integrasi dengan BPN atas kewajiban lunas BPHTB didalam proses peralihan hak atas bumi dan bangunan.
11. Adanya peningkatan pengawasan secara intensif dengan penunjuk petugas supervisi, dan dengan cara pemberian reward dan punishment yang seimbang.

Dari hasil kinerja diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang pendapatan daerah di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi yang kurang mendukung daerah antara lain :
 - a. NJOP di Kabupaten Bojonegoro masih rendah atau jauh dari harga pasar sehingga mengurangi potensi penerimaan;
 - b. NJOPTKP PBB-P2 tahun 2013 terlalu tinggi yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 3.000.000,00 sehingga mengurangi potensi penerimaan (UU No. 28 Tahun 2009), tahun 2020 dijadikan Rp. 10.000.000,- ;
 - c. Biaya pemungutan PBB untuk desa sesuai PP No. 69 Tahun 2010 hanya 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,4%, sehingga menimbulkan gejolak di tingkat desa;
 - d. Adanya pemusatan tempat pendaftaran dan pelaporan Wajib Pajak Usaha Migas di Jakarta (Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2012) sehingga mengurangi potensi bagi hasil pajak;
2. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat terkait dengan alokasi dan penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, DBH

- dll) mulai dari perhitungan penetapan yang kadang-kadang sangat cepat berubah;
3. Masih lemah dan belum tegasnya sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak (utamanya atas wajib pajak daerah);
 4. Masih kurangnya pemahaman wajib pajak daerah terhadap regulasi yang ada terkait perpajakan daerah, serta kurangnya koordinasi dengan OPD lain terkait perhitungan volume atau potensi pajak;
 5. Kelemahan sistem pemungutan PBB yang masih mengandalkan Perangkat Daerah sehingga ada sebagian hasil pungutan yang nyantol di Kepala Desa / Perangkat Desa..

Pencapaian kinerja pelayanan dibidang pendapatan daerah yang memuat indicator, IKK, target Renstra Perangkat Daerah, realisasi capaian serta proyeksi tahun (n) dan tahun (n+1) sebagaimana table 2.5 dibawah ini.

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM/IKU/IKK atau Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Analisis
			Tahun n-3 (2021)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-3 (2021)	Tahun n-2 (2022)	Tahun (n-1) 2023	Tahun (n) 2024	Tahun (n+1) 2025	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pesentase PAD terhadap APBD		100	98%	97%			76,02	71,04%	83,96%			Tidak tercapainya IKU dikarenakan dana bagi hasil migas yang fluktuatif dan tidak menentu serta kurangnya optimalnya penerimaan dari sektor retribusi dan BLUD.
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah bidang pendapatan	Indek kemandirian keuangan daerah				18,00%	18,50%				18,00%	18,50%	
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase kenaikan PAD				4,50%	4,60%				4,50%	4,60%	

	Meningkatnya kinerja pelayanan public bidang pelayanan pajak daerah	Indeks kepuasan Masyarakat(IKM/SKM)				91,02	91,80				91,02	91,80	
	Meningkatnya penyelesaian pelayanan pajak daerah	Prosentase penyelesaian layanan pajak daerah				100	100				100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan pengawasan untuk memperkecil kebocoran pemungutan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan Penerimaan Dana Perimbangan.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal baik Pusat atau Provinsi untuk penguatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pendapatan yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan guna kesinambungan pembangunan;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;

3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan;
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANKHIR RKPD TAHUN 2024

Review terhadap Rankhir RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Rankhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan. Berdasarkan analisis tersebut, Rankhir RKPD telah sesuai dengan analisa kebutuhan, baik rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dananya. Catatan yang perlu disampaikan adalah pagu dana indikatif tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Besaran pagu tahun 2024 sebesar Rp. 14.616.454.546,00. Hasil analisis kebutuhan pada Review terhadap Rankhir RKPD, disajikan sebagaimana tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel T-C 31
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

No	RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan				14.153.365.614	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan				21.234.378.279,0	-
	Keuangan					Keuangan					-
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan	100%	4.089.859.286	PROSENTASE TARGET PENCAPAIAN PENDAPATAN	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan	Bapenda	100%	7.768.766.233,0	-
		Bapenda	Persentase Capaian penerimaan pajak daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	100%			Persentase Capaian penerimaan pajak daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	Bapenda	100%		-
		Bapenda	Persentase Capaian penerimaan pajak daerah PBB dan BPHTB yang dikelola	100%			Persentase Capaian penerimaan pajak daerah PBB dan BPHTB yang dikelola	Bapenda	100%		-

		Bapenda	Persentase kenaikan penerimaan dana perimbangan dan PAD Non Pajak	100%			Persentase kenaikan penerimaan dana perimbangan dan PAD Non Pajak	Bapenda	100%		-
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	100%		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Bapenda	100%		-
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen Estimasi pendapatan daerah yang disusun	2 Dokumen	29.344.450	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	29.344.450,00	-
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun	2 Draf	276.257.450	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	1,749,885,645,00	-

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Penyuluhan/ Sosisalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan	5 Kali	125.375.250	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	5 Laporan	125.375.250,00	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	20.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	5 unit	1,362,791,198	-
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Kecamat an	473.051.310	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	4 Dokumen	1,362,791,198	-

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	538.408.587	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12	1,362,791,198	-
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2409	503.383.766	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	2409	1,362,791,198	-
	Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1807	105.746.200	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	1807	172,358,300	-

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	737612	689.012.120	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	737612	679,147,120	-
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9000	276.331.125	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	9000	1,055,992,325.	-
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9000	164.949.170	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	9000	164,949,170.	-
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150	291.992.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	150	291,992,000.	-

	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	198.402.488	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	12 Laporan	198.402.487,50	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	221.105.370	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	12 Laporan	221,105,370	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	176.500.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	2	176,500,000.	-
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Bapenda	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	10.063.506.328	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Bapenda	100%	13.465.612.046,0	-

	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen yang disusun	12 Dokumen	308.174.300	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Bapenda	12 dokumen	265.949.765,0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	191.589.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2 Dokumen	49,364,765.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.980.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	8,980,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokum Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	7.740.000,00	-

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	6.500.000,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	14.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	2 Laporan	14.300.000,00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	79.065.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	2 Laporan	179.065.000,00	-

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 Laporan	8.559.797.470	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Bapenda	7 Laporan	11.099.717.304,00	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	8.096.343.670	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44 Orang/Bulan	10,826,223,504.00	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah fasilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	435.313.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	12 Dokumen	245,353,800.00	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	11.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	24 Dokumen	11.400.000,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	9.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 Laporan	9.240.000,00	-

			Akhir Tahun SKPD								
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bapenda	Jumlah fasilitasi Pengelolaan dan Penyiapan	1 Dokumen	2.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bapenda	1 Dokumen	2.000.000,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	12 Laporan	2.000.000,00	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	Jumlah laporan dan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	1 Dokumen	3.500.000,00	-

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	2 Laporan	130.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Bapenda	2 Laporan	802.052.600,0	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bapenda	3 Paket	55,400,000.00	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bapenda	2 Orang	553,912,000.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	90.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	25 Orang	192,740,600	-

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	7 Laporan	429.325.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Bapenda	7 Laporan	581.597.269,00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 Paket	15.000.000,00	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	2 Paket	20,031,284.00	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	2 Paket	21,168,100.00	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	38.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	2 Paket	42,728,000.00	-

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	46.222.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	3 Paket	46.222.700,00	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	12 Dokumen	1.800.000,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	316.302.650	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	12 Laporan	434,647,185.00	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Jenis	92.002.856	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Bapenda	1 Jenis	92.002.855,50	-
	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Bapenda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	3 Unit	92.002.856	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Bapenda	3 Unit	92.002.855,50	

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Lainnya yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 Jenis	323.846.261	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Bapenda	3 Jenis	323.846.261,20	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12 Laporan	5.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	161.962.965	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	36 Laporan	161.962.964,80	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	156.883.296	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	14 Laporan	156.883.296,40	-

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	219.860.091	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Bapenda	3 Jenis	300.445.991	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	167.210.341	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	9 Unit	225,796,241.00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	11.649.750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda	5 Unit	11.649.750,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 Unit	63.000.000,00	-

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran berposisi sebagai pendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Terkait dengan tugas pokok tersebut dapat diartikan pula bahwa Badan Pendapatan Daerah tidak melaksanakan kegiatan secara langsung berupa program dan kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat atau kelompok masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder), sebagaimana tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel. 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro					
Nama PD : Badan Pendapatan Daerah					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

N I H I L

2.6. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran berposisi sebagai pendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Sesuai dengan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, Badan Pendapatan Daerah tidak menerima usulan program dan kegiatan dalam Musrenbang Kecamatan sebagaimana tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel. 2.7

Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro					
Nama PD : Badan Pendapatan Daerah					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

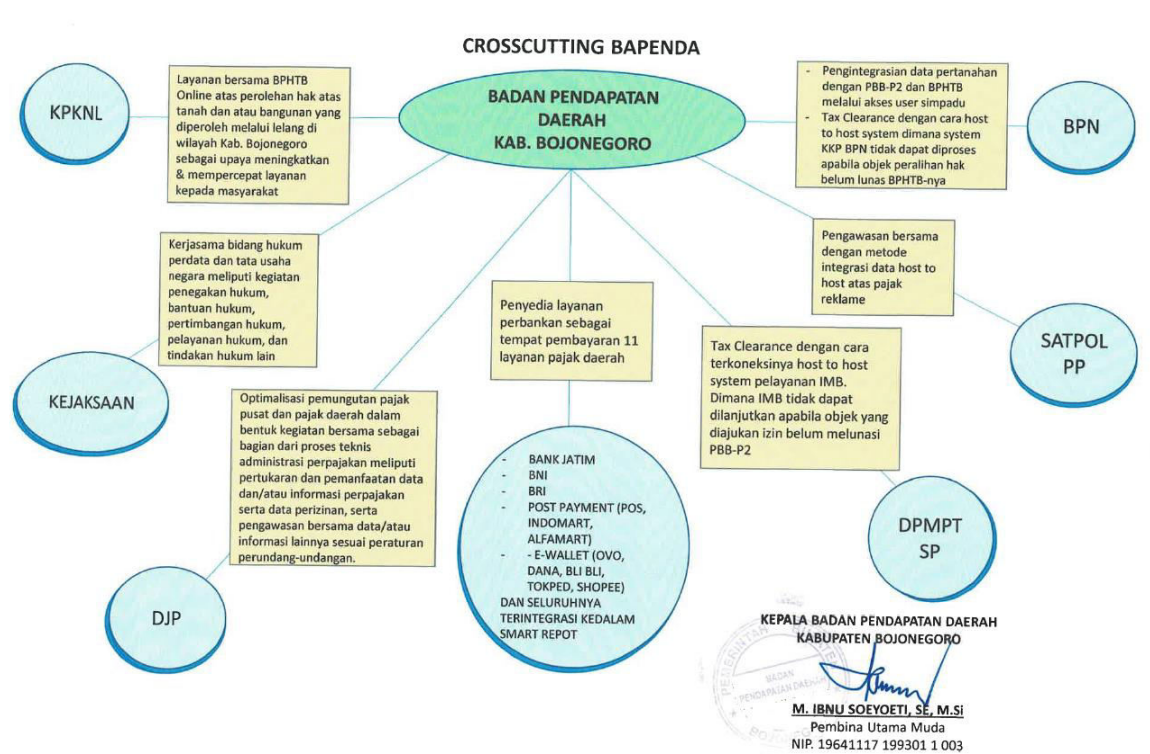
N I H I L

2.7. SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANTAR PERANGKAT DAERAH

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang urusan

keuangan bagian pendapatan. Urusan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pelaksana urusan keuangan bagian belanja dan Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana urusan keuangan bagian pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda memiliki Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Bapenda sesuai dengan tupoksinya. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan programnya melaksanakan kerjasama dengan OPD-OPD penghasil Retribusi daerah dalam rangka mengelola pendapatan daerah yang dihasilkan oleh OPD-OPD penghasil Retribusi Daerah. Selain dengan OPD penghasil Bapenda juga mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lain yang dilaksanakan guna memperlancar tugasnya dalam mengelola pendapatan daerah yang lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1

GAMBAR 2.1
HUBUNGAN KERJASAMA BAPENDA



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 telah disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020.

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, bahwa visi nasional pembangunan jangka menengah adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan demikian penyusunan RKPD yang direncanakan, terkait juga dengan penyusunan Renja telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Maka dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro telah disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yaitu

menuangkan dalam rencana program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 mendukung Misi ke-2 “Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Bertanggung jawab”. Berikut tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2024-2026 :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bojonegoro

Misi 2: Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Bertanggungjawab

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah bidang pendapatan	Persentase PAD terhadap APBD			18,00%
1.1			Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase kenaikan PAD	4,50%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan public bidang pelayanan pajak daerah	Indeks kepuasan Masyarakat(IKM/ SKM)			91,02
2.2			Meningkatnya penyelesaian pelayanan pajak daerah	Persentase penyelesaian layanan pajak daerah	100%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan dituntut untuk menghasilkan pencapaian peningkatan penerimaan daerah. Program dan kegiatan yang dirancang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 terdiri dari :

Program Utama, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini mempunyai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan, Persentase Capaian penerimaan pajak daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola, Persentase Capaian penerimaan pajak daerah PBB dan BPHTB yang dikelola, serta Persentase kenaikan penerimaan dana perimbangan dan PAD Non Pajak. Program ini mempunyai 1 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu :

1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini mempunyai indikator kinerja yaitu Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini mempunyai 8 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan, yaitu :

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Pendanaan pada Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas adalah pagu indikatif terdiri dari belanja Operasional dan belanja Modal. Besaran pagu dana indikatif Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar Rp. 14.120.184.169,00. Uraian Kegiatan dari masing-masing Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel TC-33.

TABEL T-C 33
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Kode						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
						KEUANGAN							
5						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah	100%	7.768.766.233,0	PAD		100%	3.883.465.225
						Persentase Capaian penerimaan pajak daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	Bapenda	100%		PAD		100%	
						Persentase Capaian penerimaan pajak daerah PBB dan BPHTB yang dikelola	Bapenda	100%		PAD		100%	

						Jumlah Penerimaan PAD Non Pajak	Bapenda	100%		PAD		100%	
5			02:01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Bapenda	100%		PAD		100%	3.883.465.225
5	2	4	02:01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	29.344.450,00	PAD		2	29.344.450
5	2	4	02:01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	1,749,885,645,00	PAD		2	276.257.450
5	2	4	02:01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	5 Laporan	125.375.250,00	PAD		5	131.644.013
6	2	4	02:01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	5 unit	1,362,791,198	PAD		5	20.000.000
5	2	4	02:01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	4 Dokumen	1,362,791,198	PAD		4	340.455.500
5	2	4	02:01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12	1,362,791,198	PAD		12	451.881.377

5	2	4	02:01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	2409	1,362,791,198	PAD		2530	538.422.555
5	2	4	02:01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	1807	172,358,300	PAD		1897	105.746.200
5	2	4	02:01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	737612	679,147,120	PAD		737612	617.124.120
5	2	4	02:01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	9000	1,055,992,325.	PAD		9000	290.147.681
5	2	4	02:01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	9000	164,949,170.	PAD		9000	173.196.629
5	2	4	02:01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan	Bapenda	150	291,992,000.	PAD		150	291.992.000
5	2	4	02:01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	12	198.402.488	PAD		12	208.532.612

5	2	4	02:01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	12 Laporan	198.402.487,50	PAD		12	232.220.639
5	2	4	02:01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	2	176.500.000	PAD		2	176.500.000
5		1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Bapenda	100%	13.465.612.046	PAD		100%	10.521.695.430
5		1	02:01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Bapenda	12 dokumen	265.949.765,0	PAD		12 Dok	321.707.015
5	2	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2 Dokumen	49,364,765.00	PAD		2	201.168.765
5	2	1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	8,980,000.00	PAD		2	8.980.000

5	2	1	02:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	7,740,000.00	PAD		2	7.740.000
5	2	1	02:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	6,500,000.00	PAD		2	6.500.000
5	2	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	2 Dokumen	14,300,000.00	PAD		2	14.300.000
5	2	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	2 Laporan	179,065,000.00	PAD		2	83.018.250
5		1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Bapenda	7 Laporan	8.559.761.470	PAD & DAU		7 Laporan	8.933.115.653
5		1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44	10,826,223,504.00	DAU & PAD		44	8.469.661.853

5		1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	12	245,353,800.00	PAD		12	435.313.800
5		1	02:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	24	11.400.000	PAD		24	11.400.000
5		1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1	9.240.000	PAD		1	9.240.000
5		1	02:02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bapenda	1	2.000.000	PAD		1	2.000.000
5		1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	12	2.000.000	PAD		12	2.000.000

5		1	02:02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	1	3.500.000	PAD		1	3.500.000
5		1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Bapenda	2 Laporan	130.500.000	PAD		2 Laporan	130.500.000
5		1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bapenda	3 Paket	55,400,000.00	PAD		3 Paket	40.000.000
5		1	02:05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bapenda	2 Orang	553,912,000	PAD		0 orang	0
5		1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	55 Orang	192,740,600.00	PAD		25 Orang	90.500.000
5		1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Bapenda	7 Laporan	429.325.350	PAD		7 Laporan	425.601.283
5	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1	15.000.000	PAD		1	15.000.000
5	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	2	20,031,284.00	PAD		2	2.000.000

5	2	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	2	21,168,100.00	PAD		2	10.000.000
5	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	5	42,728,000.00	PAD		5	38.000.000
5	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	1	46.222.700	PAD		1	46.222.700
5	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	12	1.800.000	PAD		12	1.800.000
5	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	12	434,647,185.00	PAD		12	312.578.583
5		1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Bapenda	1 Jenis	92.002.856	PAD		1 Jenis	86.135.238
				11	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Bapenda	3	92.002.856	PAD		3	86.135.238

5		1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Bapenda	3 Jenis	323.846.261	PAD		3 Jenis	338.400.908
5	2	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12	5.000.000	PAD		12	5.000.000
5	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	36	161.962.965	PAD		36	171.811.113
5	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	14	156.883.296	PAD		14	161.589.795
5		1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Bapenda	3 Jenis	219.860.091	PAD		3 Jenis	286.235.333
5	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	9 Unit	225.796.241.00	PAD		9 Unit	231.903.096

5	2	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda	5 Unit	11.649.750	PAD		5 Unit	12.232.238
5	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 Unit	63.000.000	PAD		1 Unit	42.100.000
					JUMLAH TOTAL				21,234,378,279.00				14.405.160.655

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Pendanaan pada Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapenda adalah pagu indikatif terdiri dari belanja Operasional dan belanja Modal. Besaran pagu dana indikatif Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar Rp. 21.234.378.279. Sumber dana pelaksanaan Program/ Kegiatan berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Uraian Kegiatan dari masing-masing Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8		
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
						KEUANGAN							
5						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	100%	7.768.766.233,0	PAD		100%	3.883.465.225
						Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan							
						Persentase Capaian penerimaan pajak daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	Bapenda	100%		PAD		100%	
						Persentase Capaian penerimaan pajak daerah PBB dan BPHTB yang dikelola	Bapenda	100%		PAD		100%	
						Jumlah Penerimaan PAD Non Pajak	Bapenda	100%		PAD		100%	
5				02:01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	100%		PAD		100%	3.883.465.225
						Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah							

5	2	4	02:01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	29.344.450,00	PAD		2	29.344.450
5	2	4	02:01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	1,749,885,645,00	PAD		2	276.257.450
5	2	4	02:01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	5 Laporan	125.375.250,00	PAD		5	131.644.013
6	2	4	02:01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	5 unit	1,362,791,198	PAD		5	20.000.000
5	2	4	02:01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	4 Dokumen	1,362,791,198	PAD		4	340.455.500
5	2	4	02:01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12	1,362,791,198	PAD		12	451.881.377
5	2	4	02:01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	2409	1,362,791,198	PAD		2530	538.422.555
5	2	4	02:01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	1807	172,358,300	PAD		1897	105.746.200

5	2	4	02:01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	737612	679,147,120	PAD		737612	617.124.120
5	2	4	02:01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	9000	1,055,992,325.	PAD		9000	290.147.681
5	2	4	02:01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	9000	164,949,170.	PAD		9000	173.196.629
5	2	4	02:01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan	Bapenda	150	291,992,000.	PAD		150	291.992.000
5	2	4	02:01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	12	198.402.488	PAD		12	208.532.612
5	2	4	02:01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	12 Laporan	198.402.487,50	PAD		12	232.220.639
5	2	4	02:01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	2	176.500.000	PAD		2	176.500.000
5		1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Bapenda	100%	13.465.612.046	PAD		100%	10.521.695.430

5		1	02:01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Bapenda	12 dokumen	265.949.765,0	PAD		12 Dok	321.707.015
5	2	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2 Dokumen	49,364,765.00	PAD		2	201.168.765
5	2	1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	8,980,000.00	PAD		2	8.980.000
5	2	1	02:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	7,740,000.00	PAD		2	7.740.000
5	2	1	02:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bapenda	2 Dokumen	6,500,000.00	PAD		2	6.500.000

5	2	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	2 Dokumen	14,300,000.00	PAD		2	14.300.000
5	2	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	2 Laporan	179,065,000.00	PAD		2	83.018.250
5		1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Bapenda	7 Laporan	8.559.761.470	PAD & DAU		7 Laporan	8.933.115.653
5		1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44	10,826,223,504.00	DAU & PAD		44	8.469.661.853
5		1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	12	245,353,800.00	PAD		12	435.313.800
5		1	02:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	24	11.400.000	PAD		24	11.400.000
5		1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1	9.240.000	PAD		1	9.240.000

5		1	02:02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bapenda	1	2.000.000	PAD		1	2.000.000
5		1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	12	2.000.000	PAD		12	2.000.000
5		1	02:02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	1	3.500.000	PAD		1	3.500.000
5		1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Bapenda	2 Laporan	130.500.000	PAD		2 Laporan	130.500.000
5		1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bapenda	3 Paket	55,400,000.00	PAD		3 Paket	40.000.000
5		1	02:05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bapenda	2 Orang	553,912,000	PAD		0 orang	0
5		1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	55 Orang	192,740,600.00	PAD		25 Orang	90.500.000

5		1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Bapenda	7 Laporan	429.325.350	PAD		7 Laporan	425.601.283
5	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1	15.000.000	PAD		1	15.000.000
5	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	2	20,031,284.00	PAD		2	2.000.000
5	2	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	2	21,168,100.00	PAD		2	10.000.000
5	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	5	42,728,000.00	PAD		5	38.000.000
5	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	1	46.222.700	PAD		1	46.222.700
5	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	12	1.800.000	PAD		12	1.800.000
5	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	12	434,647,185.00	PAD		12	312.578.583

5		1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Bapenda	1 Jenis	92.002.856	PAD		1 Jenis	86.135.238
				11	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Bapenda	3	92.002.856	PAD		3	86.135.238
5		1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Bapenda	3 Jenis	323.846.261	PAD		3 Jenis	338.400.908
5	2	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12	5.000.000	PAD		12	5.000.000
5	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	36	161.962.965	PAD		36	171.811.113
5	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	14	156.883.296	PAD		14	161.589.795
5		1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Bapenda	3 Jenis	219.860.091	PAD		3 Jenis	286.235.333

5	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	9 Unit	225,796,241.00	PAD		9 Unit	231.903.096
5	2	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda	5 Unit	11.649.750	PAD		5 Unit	12.232.238
5	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 Unit	63.000.000	PAD		1 Unit	42.100.000
					JUMLAH TOTAL				21,234,378,279.00				14.405.160.655

BAB V

P E N U T U P

Rankhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai inovasi terkait dengan pencapaian penerimaan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pembiayaan pembangunan daerah yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Pelaksanaan Perubahan RENJA ini akan berdampak besar kepada pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro mengingat fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola pendapatan daerah di lingkungan Kabupaten Bojonegoro. Dengan semakin baiknya kinerja Bapenda dalam mengelola pendapatan daerah akan berimbas kepada ketersediaan anggaran yang digunakan untuk menunjang pembangunan daerah.

Output Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah Tercapainya Target Penerimaan Daerah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pelaksanaan tugas demi tercapainya target penerimaan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standard Operating Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Rankhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro selain menjadi rencana pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Hasil evaluasi pelaksanaan RENJA yang akan disusun di akhir periode RENJA akan menjadi sumber informasi yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan Dearah
Kabupaten Bojonegoro

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

Demikian Rankhir Perubahan Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bojonegoro



M. IBNU SOEYOETI, SE, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

Kepala Badan Pendapatan Dearah
Kabupaten Bojonegoro



M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003